



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Juni 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 15 (lima belas) Anggota Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI B. Kementerian Dalam Negeri RI; C. Kementerian Keuangan RI; D. Kementerian Hukum dan HAM RI; E. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional; F. Komite I DPD RI; G. Bupati Lima Puluh Kota; H. Bupati Agam; I. Bupati Padang Pariaman; J. Bupati Pasaman; K. Bupati Pesisir Selatan; L. Bupati Sijunjung;

- M. Bupati Solok;
- N. Bupati Tanah Datar;
- O. Walikota Bukittinggi;
- P. Walikota Padang Panjang;
- Q. Walikota Padang;
- R. Walikota Payakumbuh;
- S. Pj. Walikota Sawahlunto; dan
- T. Walikota Solo.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Agam, Bupati Padang Pariaman, Bupati Pasaman, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Sijunjung, Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Walikota Bukittinggi, Walikota Padang Panjang, Walikota Padang, Walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Sawahlunto, dan Walikota Solo, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota, hari Senin, 24 Juni 2024, dibuka pukul 13.31 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Agam, Bupati Padang Pariaman, Bupati Pasaman, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Sijunjung, Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Walikota Bukittinggi, Walikota Padang Panjang, Walikota Padang, Walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Sawahlunto, dan Walikota Solo, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota, yaitu:

Masukan Terhadap RUU Kabupaten/Kota:

1. Terdapat 1 kabupaten yang menerima rumusan dalam draft RUU kab/kota yaitu: Kabupaten Solok

2. Terdapat 2 kabupaten yang tidak hadir yaitu: Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung.

3. Terdapat 11 kab/kota yang pada prinsipnya menerima draft RUU kab/kota dengan beberapa catatan yaitu:

No.	Nama Kab/Kota	Usulan Perubahan			
		Nama Kecamatan	Tanggal Hari Jadi	Karakteristik	Ibukota
1.	Kabupaten Lima Puluh Kota		<ul style="list-style-type: none"> Tanggal 13 April 1841 berdasarkan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Pemekaran Kabupaten Lima Puluh Kota 	Penambahan pada pasal 3 yaitu "Batas wilayah diatur dalam permendagri"	Ibukota di Kecamatan Sarilamak
2.	Kabupaten Agam		Dirayakan 15 Januari 1665, tetapi belum ada catatan terkait hari jadi		Ibukota di Lubuk Basung
3.	Kabupaten Pasaman	Batas wilayah sebelah utara yaitu Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Mandailing Natal	Tanggal 8 Oktober berdasarkan Keputusan Bupati		
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan ranah pesisir berubah menjadi ranah pasisia Kecamatan Batang Kapas berubah menjadi Batang Kapeh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berubah menjadi Kecamatan Bayang utara Kecamatan air pura berubah menjadi kecamatan aiapura Kecamatan IV jurai berubah menjadi Kecamatan ampek jurai			Painan Kecamatan Ampek Jurai
5.	Kabupaten Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> Batas wilayah diatur lebih lanjut dengan permendagri 	Tidak mengatur hari jadi berdasarkan	Karakteristik daerah diatur dengan peraturan daerah	

		<ul style="list-style-type: none"> • Usul pemekaran Provinsi Sumatera Barat 	perda		
6.	Kota Bukittinggi		Hari jadi 22 Desember 1784		
7.	Kota Padang Panjang		Tanggal 1 Desember 1790 berdasarkan perda Kota Padang Panjang No. 17 Tahun 2004		
8.	Kota Padang		Tanggal 7 Agustus 1669 berdasarkan SK Walikota		
9.	Kota Payakumbuh		Hari Jadi Tanggal 17 Desember 1970		
10.	Kota Sawah Lunto		Tanggal 1 Desember berdasarkan perda No. 1 tahun 2004	ditambahkan frasa "keberagaman budaya" setelah frasa situs budaya.	
11.	Kota Solok	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan mengingat ditambahkan UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat 	Hari ulang tahun tanggal 16 Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi Sumberdaya alam pertanian (beras solok) • Penambahan "adat basandi syarak syarak basandi kitabullah," "syarak mangatur adat mamakai" di seluruh RUU kab/kota Provinsi Sumatera Barat 	

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Agam, Bupati Padang Pariaman, Bupati Pasaman, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Sijunjung, Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Walikota Bukittinggi,

Walikota Padang Panjang, Walikota Padang, Walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Sawahlunto, dan Walikota Solo, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota, yaitu:

Masukan dari kepala daerah akan dibahas pada RDP Panja dengan Pemerintah.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.31 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2024

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462